

ANALISIS POTENSI PENERAPAN PSAK 45 PADA SERIKAT PEKERJA PT INKA (PERSERO)

Mawar Puspitasari ¹⁾, M. Agus Sudrajat ²⁾, Anny Widiasmara ³⁾

¹Universitas PGRI Madiun

email: mawarpuspitasari39@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun

email: agussudrajat84@gmail.com

³Universitas PGRI Madiun

email: anny.asmara@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the financial statements of PT INKA (Persero) union organization, to analyze the suitability of the presentation of financial statements at PT INKA (Persero) Labor Union organization, then to reconstruct the financial statements of PT INKA (Persero) Labor Union organization in accordance with PSAK 45. A non-profit organization is an organization whose main goal is to support an issue or situation in attracting the public for a non-commercial purpose. PSAK 45 statement intends to regulate the financial reporting of non-profit entities. By having the reporting rules, it is hoped that the financial statements of non-profit entities can be more easily understood, have relevance, and have high comparability. The Workers Union of PT Industri Kereta Api (Persero) is an organization which is a forum/institution for employees of PT Industri Kereta Api (Persero). The method used in this research was qualitative research with descriptive method. The results of the research that have been carried out show that the PT INKA Labor Union has recorded cash disbursements and income properly, as evidenced by the existence of financial reports that are in accordance with the organization's AD/ART. However, the financial statements of PT INKA (Persero) Labor Union are not in accordance with PSAK 45 and a reconstruction will be carried out so that the resulting financial reports can be more easily understood, have relevance, and have high comparability.

Keywords: Financial Statements, Non-Profit, PSAK 45

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui laporan keuangan pada organisasi Serikat pekerja PT INKA (Persero), menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan pada organisasi Serikat Pekerja PT INKA (Persero), kemudian merekonstruksi laporan keuangan organisasi Serikat Pekerja PT INKA (Persero) yang sesuai dengan PSAK 45. Organisasi nirlaba (*non-profit*) merupakan suatu organisasi yang bersasaran pokok guna mendukung suatu isu atau keadaan didalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial. Pernyataan PSAK 45 bermaksud untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dengan adanya kaidah pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding tinggi. Serikat Pekerja PT Industri Kereta Api (Persero) adalah sebuah organisasi yang merupakan suatu wadah/lembaga untuk Karyawan PT Industri Kereta Api (Persero). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Serikat Pekerja PT INKA sudah melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan kas dengan baik, dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang sesuai dengan AD/ART organisasi. Namun demikian laporan keuangan Serikat Pekerja PT INKA (Persero) tidak sesuai dengan PSAK 45 dan akan dilakukan rekonstruksi supaya laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding tinggi.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Nirlaba, PSAK 45.

PENDAHULUAN

Suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung sesuatu hal didalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter) disebut organisasi nirlaba atau organisasi non-profit. (Nainggolan, 2005) menyatakan bahwa, organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaan kegiatannya yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan. Organisasi nirlaba dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak semata-mata dipengaruhi oleh laba (profit). Seluruh kegiatannya tidak ditujukan untuk mengumpulkan laba, namun organisasi ini menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua kegiatan lembaga ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia.

Organisasi nirlaba tentu juga memiliki kewajiban dalam hal pertanggungjawaban pengelolaannya, dengan diterbitkannya laporan keuangan sebagai suatu ukuran kinerja organisasi, seperti halnya dengan organisasi bisnis. Sudah seharusnya penyusunan dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku umum, karena melihat betapa pentingnya peran laporan keuangan dalam suatu organisasi.

Standarisasi pelaporan keuangan menjadi penting, supaya didapat kesamaan ukuran dalam menilai kelayakan suatu pelaporan keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut bagi organisasi nirlaba, permasalahan mengenai penyusunan laporan keuangan tentunya harus mendapat lebih banyak perhatian, mengingat sifat dan karakteristiknya yang cenderung lebih sederhana dalam hal pencatatan transaksi keuangan dibandingkan organisasi bisnis. Dalam menyikapi permasalahan ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai badan pengembang standar Akuntansi di Indonesia, menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (PSAK 45) pada tahun 1997. Standar ini disahkan pada 23 Desember 1997 dan berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2000. Organisasi nirlaba di Indonesia yang memenuhi karakteristik sebagaimana telah diisyaratkan sebagai standar menjadikan PSAK 45 sebagai acuan sampai saat ini.

Laporan keuangan organisasi nirlaba mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan kegiatan serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi dalam kenyataannya, beberapa organisasi nirlaba lebih terfokus terhadap pengembangan program kegiatannya daripada kegiatan administrasinya. Sedangkan kegiatan akuntansi yang dilakukan mencakup pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi. Hingga saat ini masih banyak ditemui laporan keuangan organisasi yang masih sangat sederhana dan

belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga dalam penyampaian kepada pemangku kepentingan masih banyak kekurangan.

Serikat Pekerja PT Industri Kereta Api (Persero) atau disingkat SP INKA adalah sebuah wadah/lembaga untuk Karyawan PT Industri Kereta Api (Persero). SP INKA didirikan pada tanggal 9 Oktober 1999 di Kota Madiun yang bertujuan untuk mensejahterakan Anggota SP INKA dan keluarganya. SP INKA selalu mengumumkan laporan keuangan kepada anggotanya setiap bulan. Per Oktober 2020 pendapatan Serikat Pekerja PT Industri Kereta Api (Persero) ini sekitar Rp 7.530.000. Saldo akhir per 31 Oktober 2020 dari Serikat PT Industri Kereta Api (Persero) adalah Rp 40.724.903.

Untuk menyempurnakan tata kelola laporan keuangan organisasi SP INKA maka dipandang perlu untuk menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45. Maka dengan hal tersebut SP INKA berencana untuk menerapkan PSAK No. 45 dalam penyusunan laporan keuangannya.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

1. Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba adalah organisasi yang dapat dimiliki pemerintah maupun dimiliki oleh sektor swasta yang tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan. Modal dari organisasi nirlaba berasal dari dana para anggota dan donatur, tanpa mengharapkan adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan (Sujarweni, 2015, p. 215).

Menurut (Sulistiawan, 2007, p. 3) organisasi nirlaba ialah organisasi yang didirikan oleh masyarakat baik dalam bentuk yayasan, organisasi profesi, partai politik maupun organisasi keagamaan. Secara operasional organisasi ini tidak mencari laba dan tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Pengelolaannya ialah orang-orang yang dipercaya masyarakat, dan pemiliknya adalah masyarakat. Menurut (Nainggolan, 2005) organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan mereka tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata. Menurut PSAK 45 pengertian dari organisasi nirlaba ialah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Para penyumbang ini tidak mengharapkan keuntungan yang akan diperoleh pada saat organisasi ini berkembang. Namun perkembangan selanjutnya, organisasi ini menerima hasil pendapatan jasa yang diberikan publik atau dari kegiatan investasi.

2. PSAK Nomor 45 (Revisi 2011)

Pernyataan ini bermaksud untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dengan adanya pedoman pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya

banding tinggi. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011, p. 45.2). Menurut PSAK 45 paragraf 06 (revisi 2011), Tujuan laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.

3. Laporan

Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk suatu periode laporan dan catatan atas laporan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan aset bersih serta hubungan antara elemen- elemen tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan dengan pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk menilai hal-hal berikut.

- a) Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan.
- b) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan Aktivitas untuk memberikan informasi tentang dampak transaksi dan peristiwa lain yang akan mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana sumber daya digunakan dalam pelaksanaan berbagai program atau layanan. Informasi dalam laporan kegiatan digunakan bersama-sama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya untuk membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011, p. 45.8).

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Catatan atas laporan keuangan adalah komponen laporan keuangan yang menampung catatan, jadwal tambahan dan informasi lainnya yang dianggap relevan. Unsur – unsur yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas sering kali perlu didukung lanjut dengan rincian dan atau penjelasan agar lebih informatif dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011, p. 45.11).

4. Serikat Pekerja PT INKA (Persero)

Serikat Pekerja PT Industri Kereta Api (Persero) selanjutnya dalam Anggaran Dasar disingkat SP INKA adalah sebuah organisasi yang merupakan suatu wadah/lembaga untuk Karyawan PT Industri Kereta Api (Persero). Organisasi SP INKA didirikan pada tanggal 9 Oktober 1998 di Kota Madiun untuk periode jangka waktu yang tidak ditentukan, yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan nomor pencatatan: 57/251/SP. INKA/PCTT/09/XIII/2001 tanggal 17 Juli 2001. Organisasi ini bersifat independen, bebas, terbuka, mandiri, demokratis, adil, amanah, kebersamaan dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan anggota dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya. SP INKA berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi Good Corporate Governance (GCG) dalam lingkungan perusahaan. Organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu dan tidak membedakan ras, suku, agama dan asal almahater.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Kata sistematis dan terorganisir menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuannya, penelitian menggunakan cara - cara atau prosedur -prosedur tertentu yang diatur dengan baik. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016, p. 6). Sedangkan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu (Bungin, 2007, p. 68). Penelitian ini berusaha mendeskripsikan laporan keuangan yang telah disajikan oleh organisasi Serikat Pekerja PT INKA (Persero) dan memberikan gambaran mengenai rekonstruksi laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBERLANGSUNGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA SERIKAT PEKERJA PT INKA (PERSERO)

Sesuai dengan temuan dilapangan bahwa Keberlangsungan penyajian laporan keuangan pada Serikat pekerja PT INKA (Persero) cukup baik, hal ini dibuktikan dengan hal-hal berikut.

1. Bahwa di Serikat Pekerja PT INKA (Persero) melakukan pencatatan setiap pengeluaran dan pemasukan kas.
2. Bahwa di Serikat Pekerja PT INKA (Persero) Pengurus menunjuk Bendahara membuat laporan keuangan rutin setiap bulannya yang nantinya akan dipublikasikan kepada seluruh anggota SP INKA.
3. Tuntutan Serikat Pekerja PT INKA (Persero) dalam pembuatan laporan keuangan berdasar pada AD/ART organisasi.

HAMBATAN-HAMBATAN YANG ADA PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DI SERIKAT PEKERJA PT INKA (PERSERO)

Hambatan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan di Serikat Pekerja PT INKA (Persero) tidak banyak mengalami hambatan, namun lebih ke hambatan minor, hal ini dibuktikan dengan hal-hal berikut.

1. Sampai saat ini tidak ada penundaan/jeda dalam penyampaian laporan keuangan kepada anggota, laporan keuangan disampaikan oleh Bendahara dalam periode bulan yang bersangkutan secara rutin.
2. Masalah waktu, yaitu pengurus Serikat Pekerja PT INKA (Persero) merupakan karyawan organik PT INKA (Persero) sehingga dalam hal administrasi organisasi tidak bisa sepenuhnya bekerja secara langsung dan terhambat karena keadaan yang mendadak seperti adanya virus covid-19.

KESESUAIAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SERIKAT PEKERJA PT INKA (PERSERO) DENGAN PSAK NO. 45

Serikat Pekerja PT INKA (Persero) telah mengelola keuangannya dengan cukup baik, dengan membuat rincian-rincian mengenai transaksi yang terjadi setiap hari kemudian dibentuk menjadi sebuah laporan keuangan. Pencatatan laporan keuangan dilaksanakan oleh pekerja harian, kemudian diserahkan kepada Bendahara untuk di koreksi apabila ada kesalahan dan kemudian di terbitkan ke seluruh anggota SP INKA. Pencatatan laporan keuangan masih menggunakan metode pembukuan tunggal karena pengurus berpendapat laporan keuangan adalah laporan keuangan yang sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan.

KEBERHASILAN PENERAPAN PSAK 45 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SERIKAT PEKERJA PT INKA (PERSERO)

Keberhasilan penerapan PSAK 45 pada penyajian laporan keuangan Serikat Pekerja PT INKA (Persero) diukur dari:

1. Akuntabel, yaitu Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai sasaran. Pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PSAK 45 yang meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan.
2. Transparansi yaitu Pengurus wajib untuk memberikan informasi yang jelas mengenai tentang keberlangsungan laporan keuangan organisasi sehingga anggota sebagai kontrol laporan keuangan bebas untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana Serikat Pekerja PT INKA (Persero).
3. Tertib, dan disiplin yaitu Pengurus menyusun laporan keuangan setiap bulan untuk dilaporkan setiap bulannya

IDENTIFIKASI TINGKAT KEBERHASILAN PENERAPAN PSAK 45 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SERIKAT PEKERJA PT INKA (PERSERO)

Identifikasi tingkat keberhasilan penerapan PSAK 45 pada penyajian laporan keuangan Serikat Pekerja PT INKA (Persero) keadaan laporan keuangan di Serikat Pekerja PT INKA (Persero) dimana pengelolaan dana organisasi belum sesuai dengan PSAK 45. Akan dilakukan rekonstruksi laporan keuangan organisasi Serikat Pekerja PT INKA (Persero) yang sesuai dengan PSAK 45

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keberlangsungan penyajian laporan keuangan pada Serikat pekerja PT INKA (Persero). Sesuai dengan temuan dilapangan bahwa Keberlangsungan penyajian laporan keuangan pada Serikat pekerja PT INKA (Persero) tidak sesuai dengan PSAK 45.
2. Hambatan-hambatan yang ada pada penyajian laporan keuangan di Serikat Pekerja PT INKA (Persero). Hambatan yang terjadi pada penyajian laporan keuangan di Serikat Pekerja PT INKA (Persero) tidak banyak mengalami hambatan, namun lebih ke hambatan minor
3. Kesesuaian pengelolaan keuangan pada Serikat pekerja PT INKA (Persero) dengan PSAK No. 45. Kesesuaian pengelolaan keuangan pada Serikat Pekerja PT INKA (Persero) adalah tidak sesuai dengan PSAK No. 45.
4. Keberhasilan penerapan PSAK 45 pada penyajian laporan keuangan Serikat Pekerja PT INKA (Persero). Keberhasilan penerapan PSAK 45 pada penyajian laporan keuangan Serikat Pekerja PT INKA (Persero) sesuai dengan PSAK 45, hal ini diukur dari:

- a) Akuntabel, yaitu Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung-jawaban mengenai sasaran.
 - b) Transparansi yaitu Pengurus wajib untuk memberikan informasi yang jelas mengenai tentang keberlangsungan laporan keuangan organisasi sehingga anggota sebagai kontrol laporan keuangan bebas untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana Serikat Pekerja PT INKA (Persero).
 - c) Tertib, dan disiplin yaitu dalam penggunaan dana organisasi, pengurus wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan PSAK 45 dan bendahara wajib melaporkan setiap bulannya
5. Identifikasi tingkat keberhasilan penerapan PSAK 45 pada penyajian laporan keuangan Serikat Pekerja PT INKA (Persero). Identifikasi tingkat keberhasilan penerapan PSAK 45 pada penyajian laporan keuangan Serikat Pekerja PT INKA (Persero) adalah sesuai dengan PSAK

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak informan dari unsur anggota agar memperoleh data yang lebih lengkap terkait dengan penyajian laporan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah teknik pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner kepada anggota. Penyebaran kuesioner dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data terkait respon anggota organisasi atas penyajian laporan keuangan organisasi yang telah dilakukan oleh Serikat pekerja PT INKA (Persero).
2. Terkait Analisis Potensi Penerapan PSAK 45 Pada Serikat Pekerja PT Inka (Persero), bahwa dengan pengelolaan keuangan organisasi yang benar dengan menerapkan prinsip Akuntansi Nirlaba maka Pengurus bisa membangun kepercayaan anggota dimana penyajian laporan keuangan akan lebih tertata dan lebih mudah dipahami.
3. Penelitian diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada lembaga menegenai penerapan PSAK No.45 pada laporan keuangannya apabila lembaga tersebut belum menerapkan. Sehingga perlu adanya rekontruksi laporan keuangan Serikat Pekerja PT INKA (Persero) berdasarkan PSAK No.45.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (2 ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2000). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif (Revisi ed.)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, P. (2005). *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Sulistiawan, D. (2007). *Akuntansi Nirlaba menggunakan Accurate*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.